

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam stuktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Pembangunan ekonomi secara luas dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam guna meningkatkan pembangunan ekonomi.

pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan melalui pergeseran struktur kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (Tri Widodo,2006).

Pembangunan ekonomi mutlak diperlukan oleh suatu Negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan cara mengembangkan semua bidang kegiatan yang ada disuatu Negara. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan dan distribusi pendapatan yang merata.

Usaha meningkatkan pembangunan ekonomi sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, tetapi diperlukan adanya peranan pemerintah dalam hal mengatur ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur perekonomian adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah, memperluas lapangan usaha demi memperbanyak jumlah tenaga masyarakat, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia guna untuk meningkatkan laju pembangunan ekonomi yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhannya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya.

Empat faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa yaitu 1) Tanah dan kekayaan alam lainnya (SDA), 2) Barang-barang modal dan tingkat teknologi yang mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik dengan kemajuan teknologi, 3) Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja melalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja, pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja, 4) Sistem sosial dan masyarakat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai, seperti sikap berhemat yang bertujuan untuk melakukan investasi, sikap bekerja keras dan sebagai berikut. Hal ini sejalan dengan

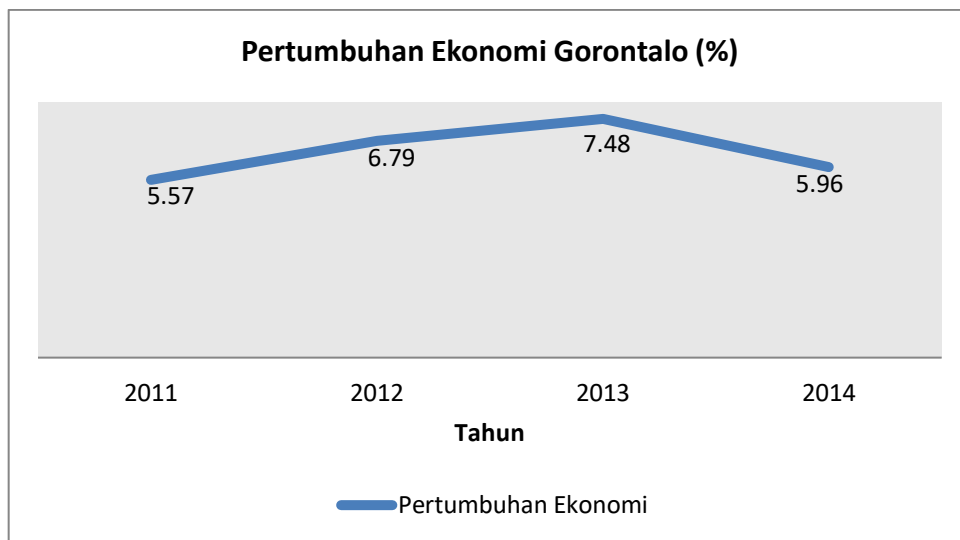
teori ekonomi neo klasik yang menitikberatkan pada modal dan tenaga kerja serta perubahan teknologi sebagai unsur baru.

Dalam pengertian pertumbuhan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sementara itu dalam analisis makro dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional *riil* yang dicapai. Terdapat 4 komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian yaitu : konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal sektor swasta (investasi), dan *export netto*(ekspor dikurangi impor).

Perekonomian di Negara (Indonesia) dapat diukur dengan produk domestik bruto (PDB). PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai PDB berdasarkan harga konstan (PDB *Riil*) Sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan merupakan pertumbuhan *riil* yang terjadi karena adanya penambahan produksi (Mankiw : 2007).

Provinsi Gorontalo terdiri atas 5 kabupaten dan 1 kota memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda di setiap wilayah. Perbedaan tersebut menjadi

hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (*trickle down effect*).



Sumber : Simreg/Data diolah

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2011-2013 mengalami pertumbuhan yang positif, namun di tahun 2014 Provinsi Gorontalo mengalami penurunan drastis hingga 5.96 persen. Meskipun demikian laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Gorontalo relatif stabil dikarenakan pencapaian hasil-hasil pembangunan sangat dirasakan masyarakat merupakan *agregat* pembangunan dari 5 Kabupaten dan 1

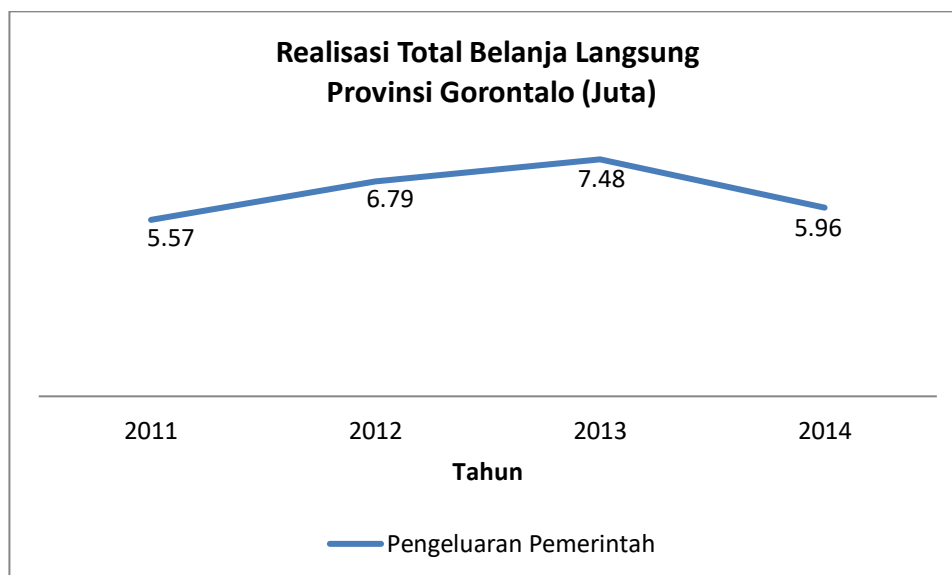
Kota di Provinsi Gorontalo yang tidak terlepas dari usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang rendah pada tahun 2014, pemerintah Gorontalo memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai apabila kegiatan ekonomi terus bertumbuh. Salah satu cara untuk memicu kegiatan ekonomi adalah melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja langsung (belanja yang dikeluarkan atau dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan) dan belanja tidak langsung (belanja yang tidak terkait tidak langsung dengan kegiatan program pemerintah). Belanja langsung terbagi ke dalam tiga kelompok, yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Pengeluaran pemerintah berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi karena pengeluaran pemerintah merupakan komponen penyusun Produk Domestik Bruto (atau PDRB dalam skala regional), bersama dengan konsumsi masyarakat, investasi, dan net ekspor. Pemikiran ini digagas oleh kaum ekonom Keynesian dimana mereka mendasari pemikiran bahwa variabel pemerintah (khususnya anggaran) dianggap sebagai salah satu variabel penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Anggaran dari pemerintah diharapkan akan menciptakan *multiplier effect* pada sektor-sektor ekonomi lainnya. *Multiplier effect*

pengeluaran pemerintah ini akan semakin besar jika asumsi bahwa belanja pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif dapat terpenuhi (Kemenkeu, 2014).

Data realisasi pengeluaran pemerintah daerah Gorontalo yang bersumber dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa terjadi peningkatan belanja pada periode 2011-2015. Tercatat berturut-turut belanja pemerintah Gorontalo pada 2011 sebesar 400548.42 juta rupiah; dan pada tahun 2015 sebesar 807187.38 juta rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa dari tahun ke tahun terdapat semakin banyak kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah dan manfaat kesejahteraan yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut juga semakin tinggi.

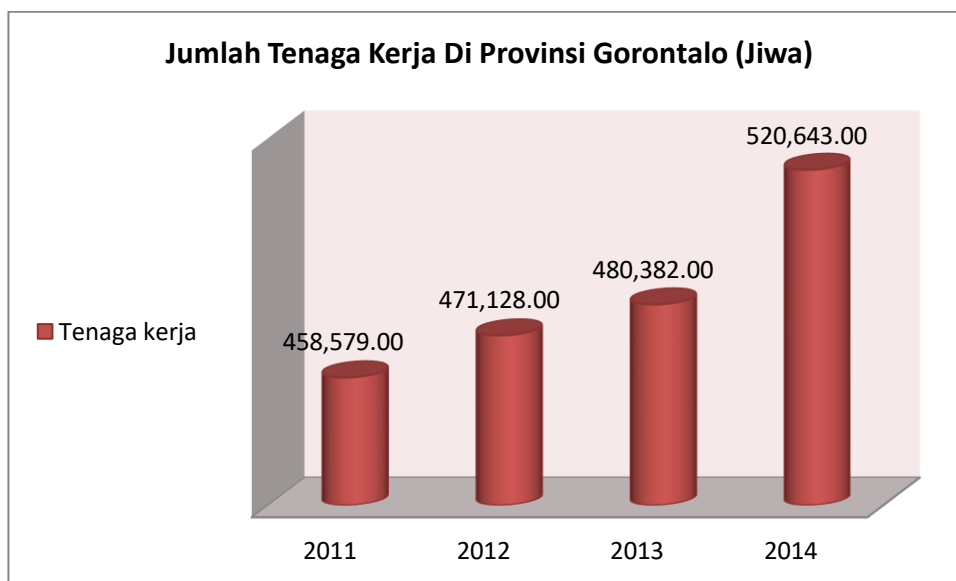


Sumber : Simreg/Data Diolah

Gambar 1.2 Realisasi Total Belanja Langsung di Provinsi Gorontalo

Selain faktor pengeluaran pemerintah, Gorontalo memiliki potensi sumber daya manusia yang melimpah. Barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah yang pada akhirnya dihitung ke dalam PRDB tidak terlepas

dari sumber daya manusia yang tersedia. Perekonomian yang bergerak cepat pun pada akhirnya berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan menekan tingkat pengangguran dan dalam jangka panjang meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan mengenai perluasan kesempatan kerja merupakan hal penting di suatu daerah, karena dapat menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dilihat Dari data yang ada, tenaga kerja di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2011-2014 dimana pada tahun 2014 jumlah tenaga kerja mencapai sebanyak 520.643,00 Jiwa.

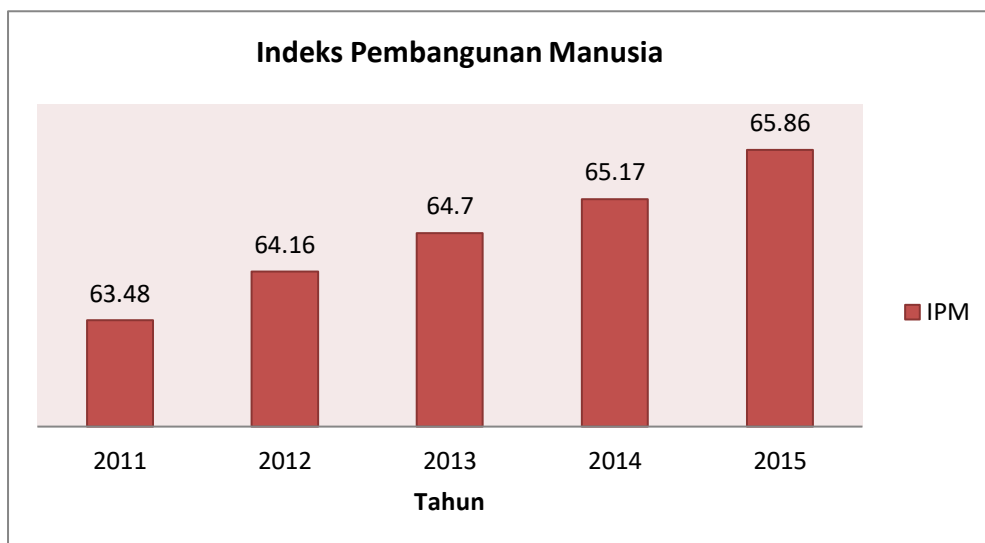


Sumber: Simreg/Data diolah

Gambar 1.3 Jumlah Total Tenaga Kerja

Selain pengeluaran pemerintah dan tenaga, indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur mutu modal manusia, United Nation Development Program (UNDP) mengenalkan

konsep mutu modal manusia yang diberi nama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Dewi dan I Ketut,2014).



Sumber: BPS/Data Diolah

Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis akan meneliti dan menganalisis tentang “**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, dan Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2015**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dilihat dari kasus tersebut, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur apakah masyarakat dalam suatu daerah sudah hidup sejahtera atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi juga sangatlah dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran pemerintah, semakin tinggi tingkat pengeluaran pemerintah maka tingkat produktivitas barang dan jasa akan meningkat sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja juga merupakan syarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Semakin banyak jumlah tenaga kerja maka produktivitas akan barang dan jasa semakin meningkat pula. Indeks pembangunan manusia juga mempunyai peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, semakin baik tingkat pembangunan manusia disuatu daerah maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Seberapa besar pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2010-2015 ?
2. Seberapa besar pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2010-2015 ?
3. Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2010-2015 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2010-2015.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2010-2015.
3. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2010-2015.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik, hasil penelitian agar dapat menjadi pengetahuan keilmuan dibidang ekonomi, khususnya untuk yang terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia.
2. Manfaat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan pemerintah menyangkut Indeks Pembangunan Manusia sehingga dapat menjadikan kebijakan yang efektif.
3. Manfaat operasional, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Indeks Pemb